

CATATAN HASIL PENGAWASAN

RAPAT PLENO PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) SEMESTER I TAHUN 2026

*“Bawaslu DIY Tekankan Akurasi Data Disabilitas dan Sinkronisasi Sistem pada Pleno Rekapitulasi
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026”*

Yogyakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) lakukan pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU DIY dan dihadiri oleh Bawaslu DIY, pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI/Polri, serta partai politik. Forum tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi pemutakhiran data pemilih secara berkala yang dilaksanakan setiap semester sebagai upaya menjaga kualitas daftar pemilih menuju Pemilu Tahun 2029.

Pengawasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam memastikan seluruh proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, serta menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran Bawaslu dalam rapat pleno juga bertujuan untuk memastikan setiap tahapan rekapitulasi berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 100 huruf e Bawaslu Provinsi berkewajiban: “mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan pasal 104 huruf e Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: “mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”, serta Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 3 “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB melalui pencegahan, pengawasan langsung, Uji Petik dan pengawasan partisipatif”.

Dalam rapat tersebut, KPU DIY menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebanyak **2.954.164 pemilih**, terdiri atas **1.438.982 pemilih laki-laki** dan **1.515.182 pemilih perempuan** yang tersebar di 78 kapanewon/kemantren dan 438 desa/kelurahan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak **24.577 pemilih** dibandingkan hasil rekapitulasi Semester II Tahun 2025.

Penambahan tersebut berasal dari **61.312 pemilih baru** dan pengurangan dari **36.735 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS)**.

Selama Semester I Tahun 2026 ini, Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY telah melakukan pengawasan proses PDPB secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan uraian hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY telah mengeluarkan imbauan terkait PDPB kepada KPU Kabupaten/Kota setempat sebanyak 15 imbauan
2. Bahwa Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY telah membentuk Posko Aduan Masyarakat untuk menerima aduan masyarakat terkait PDPB;
3. Bahwa Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY dalam rangka pengawasan “Coklit Terbatas” atau Coktas;
4. Bahwa Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY telah melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga, dan/atau pihak yang terkait dalam pengawasan PDPB
5. Bahwa Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY telah melakukan Uji Petik terhadap daerah yang rawan pada dimensi/variable hak pilih;
6. Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Uji Petik data yang digunakan diperoleh dari hasil koordinasi dengan Pemerintah setempat dan instansi terkait, juga dilakukan turun langsung ke rumah warga untuk mendapatkan data banding hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU, dengan hasil sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Perubahan Data Pemilih:

Kabupaten/Kota	Kapanewon/Kemantren	Kelurahan/Desa	Pemilih Baru	Pemilih TMS	Perbaikan Data
Kulon Progo	12	88	6.035	3.876	1.898
Bantul	17	75	14.373	8.712	6.001
Gunung Kidul	18	144	14.420	9.027	7.168
Sleman	17	86	19.612	9.677	1.119
Kota Yogyakarta	14	45	6.872	5.443	9.905
Jumlah	78	438	61.312	36.735	26.091

Tabel : Rekapitulasi Perubahan Data Pemilih di Wilayah DIY

b. Rekapitulasi Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota	Kapanewon/Kemantren	Kelurahan/Desa	Pemilih Laki-laki	Pemilih Perempuan	Jumlah Total
Kulon Progo	12	88	171.289	180.162	351.451
Bantul	17	75	375.958	391.542	767.500
Gunung Kidul	18	144	307.021	320.496	627.517
Sleman	17	86	427.929	452.387	880.316
Kota Yogyakarta	14	45	156.785	170.595	327.380
Jumlah	78	438	1.438.982	1.515.182	2.954.164

Tabel: Rekapitulasi pemilih berdasarkan jenis kelamin se-DIY

c. Rekapitulasi Data Pemilih Disabilitas

Ragam Disabilitas	Jumlah Pemilih
Fisik	12.275
Intelektual	2.980
Mental	7.750
Sensorik Wicara	4.881
Sensorik Rungu	1.727
Sensorik Netra	2.960
Jumlah	31.576

Tabel: Rekapitulasi pemilih disabilitas di wilayah DIY

- Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY dalam melaksanakan Coklit Terbatas maupun Uji petik memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 12 saran perbaikan dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Saran Perbaikan

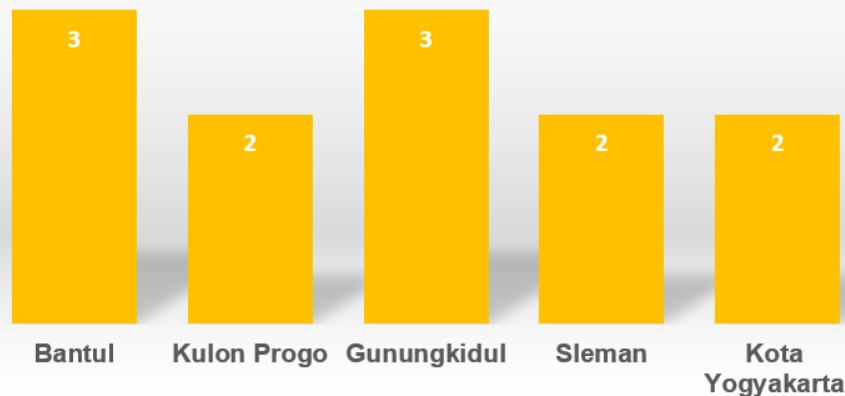


Diagram : Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY

8. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Semester I Tingkat Provinsi Tahun 2026, Bawaslu DIY memberikan masukan sebagai berikut:
 - a. Meminta kepastian validitas data pemilih disabilitas, khususnya agar tidak terjadi penghitungan ganda (*double count*) bagi pemilih yang menyandang lebih dari satu jenis disabilitas, mengingat data ini penting sebagai dasar penentuan lokasi dan aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - b. Menekankan perlunya standar akurasi data yang tinggi untuk mengidentifikasi hambatan aksesibilitas pemilih disabilitas;
 - c. Sinkronisasi data Sidalih dan Cek DPT *Online*: ditemukan secara acak di beberapa kabupaten/kota bahwa data hasil PDPB yang telah diputuskan (dikotak palu) pada triwulan sebelumnya belum termutakhirasi pada laman Cek DPT *Online*, sehingga dinilai belum memenuhi asas mutakhir dan akuntabel sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 2.
 - d. Perubahan sistem Cek DPT *Online*: sistem terbaru mensyaratkan verifikasi 4 (empat) langkah dengan kode OTP yang bersifat personal per nomor telepon, berbeda dari sistem sebelumnya yang dapat diakses langsung menggunakan NIK. Perubahan ini dinilai berpotensi menyulitkan masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia dan masyarakat pedesaan yang secara ekonomi tidak memiliki telepon seluler pribadi dan selama ini terbiasa dibantu oleh petugas KPU dalam pengecekan data pemilih.
 - e. Bawaslu DIY mencatat hasil pleno terbuka Rekapitulasi PDPB Semester I Tahun 2026 tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER I TAHUN 2026 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

